

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI
KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH KOTA DAN
KABUPATEN SE-JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

GIDEON GRACENOV

NIM. 12030114183016

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Gideon Gracenov
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183016
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN
SE-JAWA TENGAH**
Dosen Pembimbing : Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D

Semarang, Desember 2016

Dosen Pembimbing

(Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D)

NIP. 196505201990011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Gideon Gracenov
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183016
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
DAN KABUPATEN SE-JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal Desember 2016

Tim Penguji :

1. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D (.....)

2. Agung Juliarto, S.E., M.Si, Akt., Ph.D (.....)

3. Dul Muid, S.E., M.Si, Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Gideon Gracenov, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN SE-JAWA TENGAH** , adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

Gideon Gracenov

NIM. 12030114183016

**“JANGANLAH HENDAKNYA KAMU KUATIR TENTANG
APAPUN JUGA, TETAPI NYATAKANLAH DALAM SEGALA
HAL KEINGINANMU KEPADA ALLAH DALAM DOA DAN
PERMOHONAN DENGAN UCAPAN SYUKUR.”**

•Filipi 4:6

Skripsi ini dipersembahkan untuk keluarga dan teman-teman penulis

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of regional revenue, general allocation fund, and special allocation fund in one year on the financial performance districts and cities in the region of Central Java in next year. The study use financial independence ratio as financial performance measure/

The study is explanatory study with quantitative approach. The study population includes all districts and cities in the Region of Central Java 2010-2014. This samples in this study were determined through sensus sampling method, as all 35 districts and cities in Central Java. The data utilizes is secondary data consists Consolidated Actual Revenues and Expenditures Budget (APBD) 2010-2014 obtained from the Direcorate General of Fiscal Balance (DJPK). The study tested the hypothesis collected by using multiple linear regression.

The results of this study showed that the regional income effect has positive effect on financial performance, while general allocation fund and special allocation fund has negative effect on financial performance

Keywords: Regional Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Financial Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada suatu tahun terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah di tahun berikutnya. Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan sebagai ukuran kinerja keuangan daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus, dimana seluruh 35 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data APBD tahun 2010-2014 digunakan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kinerja Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Mahakuasa, atas segala berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN SE-JAWA TENGAH”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa usaha yang penulis lakukan selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis, atas segala restu, kasih dan sayang kepada penulis, serta Paman dan Saudara penulis yang selalu menjadi semangat dan memberi dukungan kepada penulis;
2. Dr. Suharmono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
3. Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D, selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;

4. Drs. Sudarno, M.Si, Akt, Phd. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah banyak membantu penulis dalam permasalahan akademis di Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf pengajar di FEB Universitas Diponegoro yang telah mengajar dan membagi ilmu serta pengalamannya kepada penulis selama proses perkuliahan;
7. Rekan-rekan seangkatan tugas belajar Undip, BPK-23, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan menemani serta memberikan pengetahuan baru kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Diponegoro;
8. Rekan-rekan mahasiswa reguler di Universitas Diponegoro, baik yang tergabung dalam KKN LAM-EBIS dan komunitas lain, yang telah menyediakan suasana kekeluargaan selama di Universitas Diponegoro;
9. BPK RI yang telah memberi izin bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dan gelar akademis di Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang menggunakannya.

Semarang, Desember 2016
Penulis,

Gideon Gracenov
NIM. 12030114183021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teor Keagenan	14
2.1.2 Otonomi Daerah.....	16
2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	19
2.1.3.1 Definisi Kinerja Keuangan Daerah.....	19
2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	21
2.1.3.3 Rasio Keuangan sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah	25
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	33
2.1.5 Dana Alokasi Umum.....	35
2.1.6 Dana Alokasi Khusus	37
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
2.4 Hipotesis Penelitian.....	44
2.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	44

2.4.2	Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	47
2.4.3	Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....		54
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	54
3.1.1	Variabel Terikat	54
3.1.2	Variabel Bebas	55
3.1.2.1	Pendapatan Asli Daerah.....	56
3.1.2.2	Dana Alokasi Umum.....	57
3.1.2.3	Dana Alokasi Khusus.....	58
3.2	Populasi dan Sampel	59
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	60
3.4	Metode Pengumpulan Data	60
3.5	Metode Analisis Data.....	60
3.5.1	Uji Asumsi Klasik.....	61
3.5.1.1	Uji Normalitas.....	61
3.5.1.2	Uji Multikolinearitas	62
3.5.1.3	Uji Heterokedastisitas	63
3.5.1.4	Uji Autokorelasi.....	64
3.5.2	Regresi Linear Berganda.....	64
3.5.3	Uji Hipotesis	65
3.5.3.1	Uji Statistik t	65
3.5.3.2	Uji Statistik F	66
3.5.3.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		68
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	68
4.2	Hasil Analisis Data.....	69
4.2.1	Statistik Deskriptif	69
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	71
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	71
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas	73
4.2.2.3	Uji Heterokedastisitas	74
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	75
4.2.3	Uji Regresi Linear Berganda.....	76
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis	78
4.2.4.1	Uji F	78
4.2.4.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	79
4.2.4.3	Uji t	80
4.3	Pembahasan.....	81

4.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	81
4.3.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	83
4.3.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	84
BAB V PENUTUP.....		87
5.1	Simpulan.....	87
5.2	Keterbatasan	87
5.3	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN.....		95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 4.1.	Sampel Penelitian.....	69
Tabel 4.2.	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	70
Tabel 4.3.	Tabel Analisis <i>Kolmogorof-Smirnov</i>	71
Tabel 4.4.	Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4.5.	Uji <i>Glejser</i>	74
Tabel 4.6.	Uji <i>Durbin Watson</i>	75
Tabel 4.7.	Uji Regresi Linier Berganda	76
Tabel 4.8.	Uji F	78
Tabel 4.9.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	79
Tabel 4.10.	Uji t	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia	6
Gambar 1.2	Diagram PAD dan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah	7
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1	Grafik P-Plot.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Tabulasi Data.....	95
------------	--------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan. Konsep otonomi daerah di Indonesia telah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada prinsipnya daerah diberikan kewenangan otonom yang seluas-luasnya dalam mengatur pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Namun, sejak pelaksanaan undang-undang ini pada era orde baru, nuansa sentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih kental dibandingkan desentralisasi. Belum adanya kepastian mengenai kewenangan dan perimbangan keuangan pada daerah otonom serta kekuasaan yang tersentralisasi mengindikasikan bahwa otonomi daerah tidak berjalan dengan efektif.

Memasuki era reformasi pada tahun 1998, muncul tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota. Munculnya berbagai permasalahan tentang sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah yang telah memberikan kontribusi besar dari kekayaan daerah yang dimilikinya menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbaharui menjadi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui paket undang-undang tersebut, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia, diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan mengelola sumber-sumber keuangan (Sumarsono, 2010).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2007). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditetapkan kemudian juga menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua undang-undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Yuliandriansyah, 2009). Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat

melakukan pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2007), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 memberikan penekanan pada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan fungsi wajib, yaitu pelayanan umum. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber pendanaan yang besar agar mampu menunjang segala pemenuhan kebutuhan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan pengalihan dan penyerahan tanggung jawab pendanaan serta penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan desentralisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Nugroho (dikutip dalam Putri, 2016), APBD merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dijadikan sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam menyusun dan menentukan kebijakan daerah. APBD memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah. Pada dasarnya, APBD merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kuncoro (2014), sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing komponen ini dapat menunjang kegiatan

pemerintahan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada pendapatan asli daerah yang dimilikinya (Halim, 2007). Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004, disebutkan sumber utama dari PAD yang tertuang dalam APBD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

PAD merupakan salah satu tulang punggung utama pembiayaan daerah.. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih diutamakan dibanding dengan sumber yang berasal selain PAD. Hal ini disebabkan PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Halim, 2004). Wenny (2012) menyebutkan pada dasarnya apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Walaupun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah (Santoso, 1995). Penelitian Batubara (2009) menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

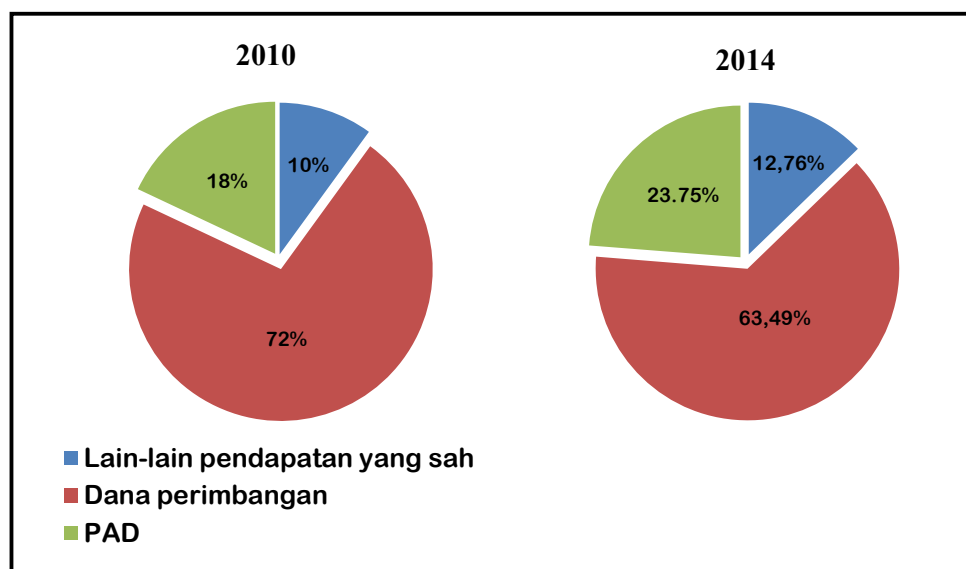
menyebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik (Halim, 2014). Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2004, dana perimbangan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Saragih (2003) menyebutkan bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan penting pemerintah daerah untuk operasional dan pembangunan. Dana perimbangan amat diperlukan karena di samping keterbatasan sumber daya asli daerah, terdapat kebutuhan besar untuk pembiayaan pembangunan. Sidik (2002) menyebutkan peran dana perimbangan amat signifikan karena pendanaan kebutuhan belanja daerah lebih banyak didominasi oleh penggunaan DAU dari pada PAD. Konsekuensinya, jumlah penerimaan yang didominasi dari dana perimbangan menyebabkan pemerintah daerah kurang mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahnya karena

pemerintah daerah lebih menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat dibanding pendapatan asli daerahnya.

Secara umum komposisi pendapatan pemerintah daerah seluruh Indonesia yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, ditunjukkan dalam gambar 1.1

Gambar 1.1
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia

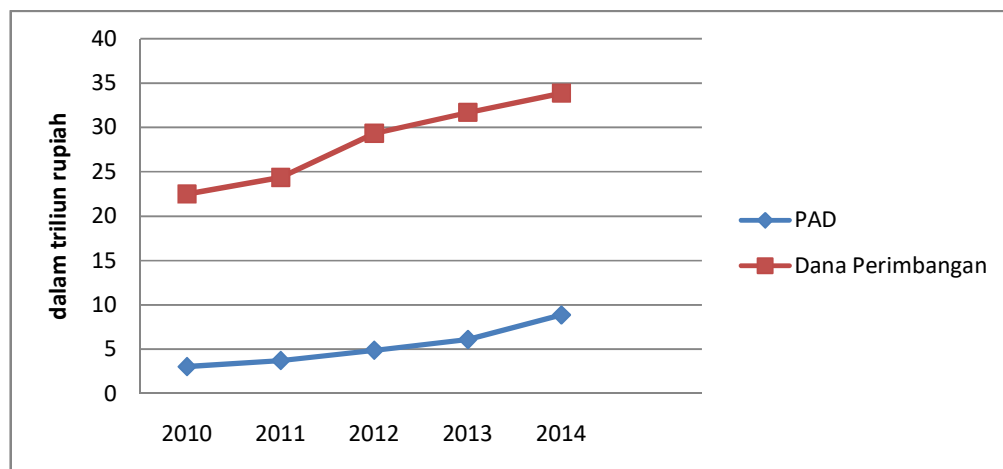


Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD DJPK 2014

Gambar 1.1 menunjukkan komposisi pendapatan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2010 dan 2014. Komposisi pendapatan daerah lebih banyak didominasi oleh dana perimbangan, meskipun selama empat tahun terdapat penurunan jumlah dana perimbangan dan kenaikan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal tersebut menunjukkan meskipun PAD mengalami peningkatan, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan atau transfer dari pusat masih tinggi.

Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi strategis di Pulau Jawa dan mempunyai banyak potensi daerah untuk menyerap PAD. Setiap tahunnya, pemerintah daerah se-Jawa Tengah juga menerima bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Secara umum, perbandingan penerimaan dari PAD dan dana perimbangan kabupaten/kota se-Jawa Tengah ditunjukkan dalam grafik 1.1

Gambar 1.2
Diagram PAD dan Dana Perimbangan
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahun total penerimaan PAD kabupaten/kota se-Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Namun dalam kenyataannya, kenaikan PAD tersebut tidak signifikan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, dinyatakan bahwa kenaikan PAD tidak sebanding dengan penerimaan dari potensi daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Temuan BPKP menyatakan bahwa pemetaan potensi daerah selama ini yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah tidak efektif. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan asli daerah seharusnya dapat diterima apabila

berhasil dimanfaatkan. Gambar 1.2 juga menunjukkan bahwa jumlah dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah se-Jawa Tengah masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Jumlah dana perimbangan yang besar menunjukkan pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaan belanjanya.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas pemerintahan di daerah berperan sebagai manajer keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah berdasarkan peraturan perundangan (Mardiasmo, 2009). Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan itu disebut dengan kinerja keuangan daerah. Menurut Syamsi (dikutip dalam Putri, 2016), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Suatu manajemen harus selalu dinilai kemampuannya dalam mencapai tujuan tersebut. Penilaian kinerja pemerintah merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat (Bappenas, 2009). Mangkunegara (dikutip dalam Julitawati, 2012) menyebutkan pengukuran kinerja perlu dilakukan berkelanjutan untuk memberikan umpan balik, sehingga ada upaya perbaikan secara terus menerus secara objektif untuk meningkatkan prestasinya dalam suatu periode waktu tertentu.

Halim (2007) menyatakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, analisis rasio keuangan dapat dilakukan terhadap APBD yang telah ditetapkan maupun realisasi dari APBD. Hasil dari analisis rasio tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi. Helfert (2000) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, sedangkan Munawir (1995) menjelaskan rasio sebagai hubungan atau perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

Pengukuran kinerja keuangan melalui rasio dapat dilakukan salah satunya dengan analisis rasio kemandirian. Ulum (dikutip dalam dalam Marizka 2013) menyebutkan rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Halim (2007) menyatakan rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pinjaman.

Rasio kemandirian merupakan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu waktu. Semakin besar rasio kemandirian dapat dikatakan tingkat

kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, karena komponen PAD yang besar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah (Halim, 2014). Akuntabilitas kinerja menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya memperhitungkan indikator keluaran (*output*) saja, tetapi memperhitungkan indikator hasil (*outcome*). *Outcome* lebih dinilai baik dibandingkan *output*, karena memperhitungkan dampak terhadap masyarakat. Dalam Mardiasmo (2009), estimasi indikator kinerja tersebut dapat ditentukan berdasarkan *time lag*, karena dari aktivitas tertentu di suatu waktu hasilnya dapat dirasakan pada masa mendatang. Semakin besar perbandingan pendapatan daerah terhadap transfer pusat, dampaknya akan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menyumbang PAD.

Penelitian tentang kemandirian keuangan daerah telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan Tahar (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka akan meningkatkan kemandirian daerah, sementara semakin tinggi DAU maka kemandirian daerah akan semakin menurun, dengan kata lain ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat menyebabkan penurunan kinerja pemerintah daerah. Penelitian Marizka (2013) yang menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAK yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Penelitian Abdullah Febriansyah (2015) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Putri (2016) terhadap pemerintah daerah se-

Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa PAD dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan DAU menurunkan kemandirian keuangan sementara DAK tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, untuk memperoleh bukti yang empiris dan memberi literatur baru maka penulis mengangkat judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah, penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Tengah?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Tengah tahun berikutnya.

2. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Tengah tahun berikutnya .
3. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Tengah tahun berikutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberi tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan pada pemerintah
3. Bagi pemerintah, sebagai masukan dan informasi untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara terperinci terdiri dari lima bagian utama, yang setiap bagiannya tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama menyajikan dinamika otonomi daerah, yang kemudian dilakukan perumusan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dipaparkan juga tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Bab kedua menguraikan dasar teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan penelitian, menyajikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema permasalahan sejenis, menampilkan gambaran hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ketiga berisi diskripsi dan definisi operasional atas variabel yang digunakan dalam penelitian, penjabaran populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan serta metode pengumpulan yang digunakan dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab keempat mendiskripsikan desain seleksi sampel, pengujian hipotesis, dan memperoleh hasil analisis dengan melakukan pengolahan data kemudian menginterpretasikan ke bagian pembahasan.

BAB V Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian. Bab ini juga memberikan penjelasan mengenai implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.